

CASCADING ASISTEN

SEKRETARIS DAERAH		
Tujuan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi	
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	ITKP	
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	
Indikator	Indeks Pelayanan Publik	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	
Sasaran	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	
Indikator	Nilai Evaluasi AKIP	
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 29.064.962.883,-
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 4.077.457.400,-
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 288.963.650,-

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Sasaran	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintah Daerah
Indikator	Persentase pengelolaan pemerintahan umum
	Indek Reformasi Hukum
	Indeks Zakat Nasional
	Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial dan Keagamaan di Tengah Masyarakat

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja Sekretariat Daerah
Indikator	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah
Indikator	Nilai IKM Sekretariat Daerah
Sasaran	Meningkatnya produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki BUMD
Indikator	Return On Asset (ROA) BUMD
Sasaran	Meningkatnya akses keuangan Kota Payakumbuh
Indikator	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Sasaran	Meningkatnya pengendalian administrasi pembangunan
Indikator	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan
	Persentase strategi pengendalian inflasi (4K) Kota Payakumbuh

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintahan
Indikator	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan
Sasaran	Meningkatnya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, profesional dan akuntabel
Indikator	Indeks Kematangan Organisasi
Sasaran	Meningkatnya kualitas kebijakan
Indikator	Indeks Kualitas Kebijakan
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
Indikator	Indeks BerAKHLAK (Opsional)
	Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Kategori Pelayanan Baik
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK

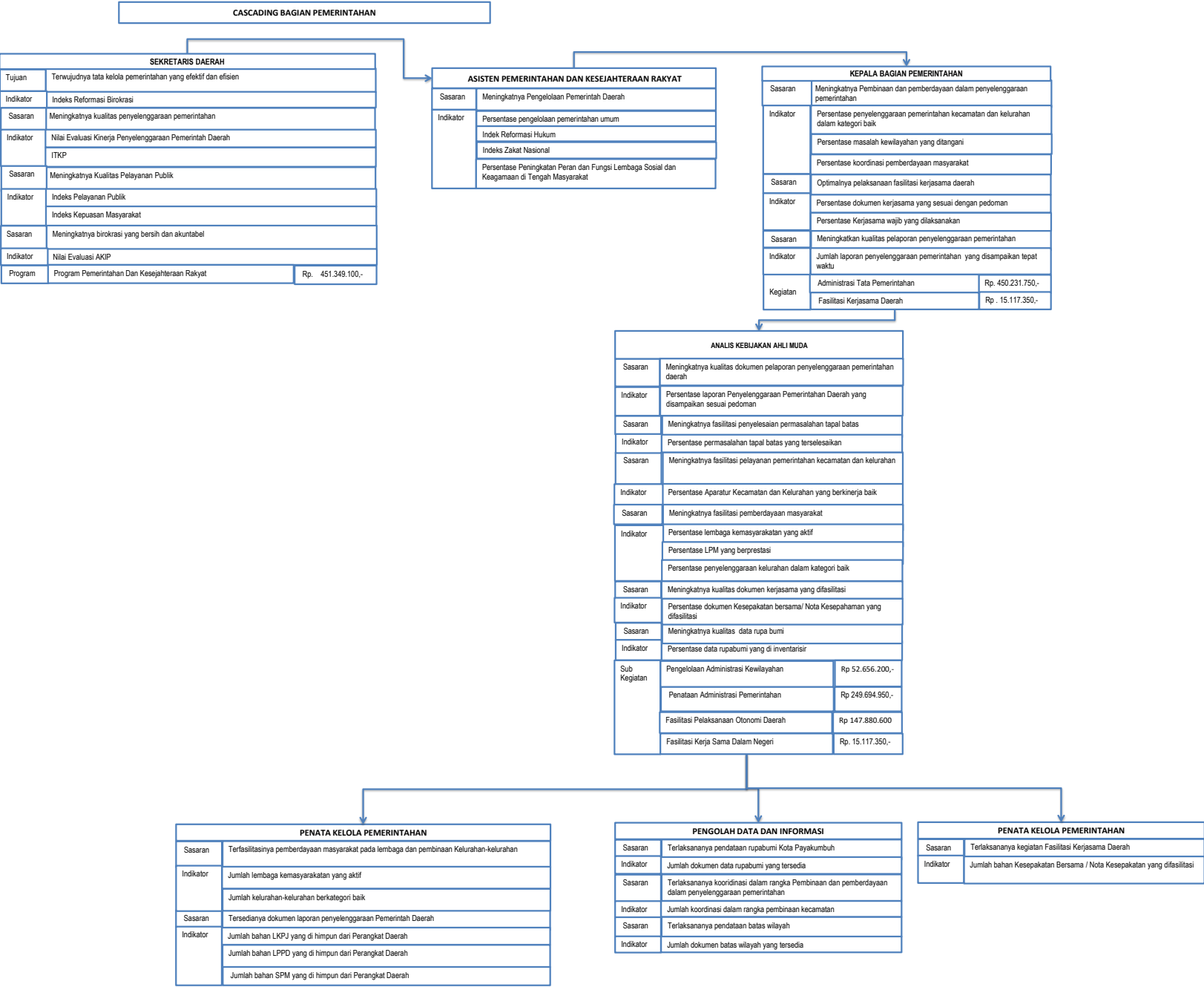
CASCADING STAF AHLI WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH	
Tujuan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	ITKP
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator	Indeks Pelayanan Publik
	Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
Indikator	Nilai Evaluasi AKIP

STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	
Sasaran	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang pemerintahan, hukum dan politik
Indikator	Jumlah rekomendasi bidang pemerintahan, hukum dan politik

STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	
Sasaran	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang kemasyarakatan dan
Indikator	Jumlah rekomendasi bidang kemasyarakatan dan SDM

STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	
Sasaran	Meningkatnya kualitas kebijakan Walikota dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan
Indikator	Jumlah rekomendasi bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan



CASCADING BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIS DAERAH		
Tujuan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi	
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	ITKP	
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	
Indikator	Indeks Pelayanan Publik	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	
Sasaran	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	
Indikator	Nilai Evaluasi AKIP	
Program	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 2.986.544.900,-

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Sasaran	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintah Daerah
Indikator	Persentase pengelolaan pemerintahan umum
	Indek Reformasi Hukum
	Indeks Zakat Nasional
	Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial dan Keagamaan di Tengah Masyarakat

KEPALA BAGIAN KESEJARTERAAN RAKYAT		
Sasaran	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga keagamaan di tengah masyarakat	
Indikator	Persentase lembaga keagamaan yang aktif	
	Persentase mesjid yang berfungsi secara optimal	
Sasaran	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga sosial di tengah masyarakat	
Indikator	Persentase Organisasi Sosial Yang Aktif	
Kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 2.986.544.900,-

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA		
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga keagamaan	
Indikator	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	
	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 815.837.200,-

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	
Sasaran	Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Keagamaan di Kota Payakumbuh
Indikator	Jumlah Dokumen Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam di Kota Payakumbuh
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam di Kota Payakumbuh
Sasaran	Terlaksananya fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan
Indikator	Jumlah dokumen pelaksanaan wiirid pengajian ASN di Pemerintah Kota Payakumbuh

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA		
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan tata kelola sarana ibadah	
Indikator	Persentase Masjid yang memiliki kepengurusanyang baik	
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi pengelolaan MTQ	
Indikator	Jumlah cabang perlombaan yang diikuti dalam pelaksanaan MTQ Nasional	
Sub	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 422.638.950,-

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	
Sasaran	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Tata Kelola Sarana Ibadah
Indikator	Jumlah dokumen kepengurus/ tata kelola masjid yang didokumentasikan
Sasaran	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan MTQ
Indikator	Jumlah dokumen fasilitasi LPTQ pelaksanaan Lomba pada MTQN
	Jumlah dokumen untuk pelaksanaan cabang MTQN Tingkat Kota

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA		
Sasaran	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga sosial	
Indikator	Persentase organisasi sosial yang dibina dan difasilitasi	
	Persentase proposal bantuan hibah yang diproses	
Sasaran	Meningkatnya pembinaan terhadap kegiatan UKS di Sekolah/Madrasah	
Indikator	Persentase sekolah/ madrasah yang dibina untuk meningkatkan stratifikasi UKS pada tahun n	
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 1.748.068.750,-

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	
Sasaran	Tersedianya dokumen pembinaan dan fasilitasi Terhadap Lembaga Sosial Keagamaan
Indikator	Jumlah dokumen bantuan Hibah yang diproses
	Jumlah Dokumen Fasilitasi Terhadap Organisaasi Sosial Keagamaan
Sasaran	Terlaksananya pembinaan fasilitasi UKS di kota Payakumbuh
Indikator	Jumlah dokumen Sekolah/ Mardasah yang di bina dan di fasilitasi untuk peningkatan stratifikasi UKS

CASCADING BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH		
Tujuan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi	
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	ITKP	
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	
Indikator	Indeks Pelayanan Publik	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	
Sasaran	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	
Indikator	Nilai Evaluasi AKIP	
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 29.064.962.883,-
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 4.077.457.400,-
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 288.963.650,-

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Sasaran	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintah Daerah
Indikator	Persentase pengelolaan pemerintahan umum
	Indek Reformasi Hukum
	Indeks Zakat Nasional
	Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Sosial dan Keagamaan di Tengah Masyarakat

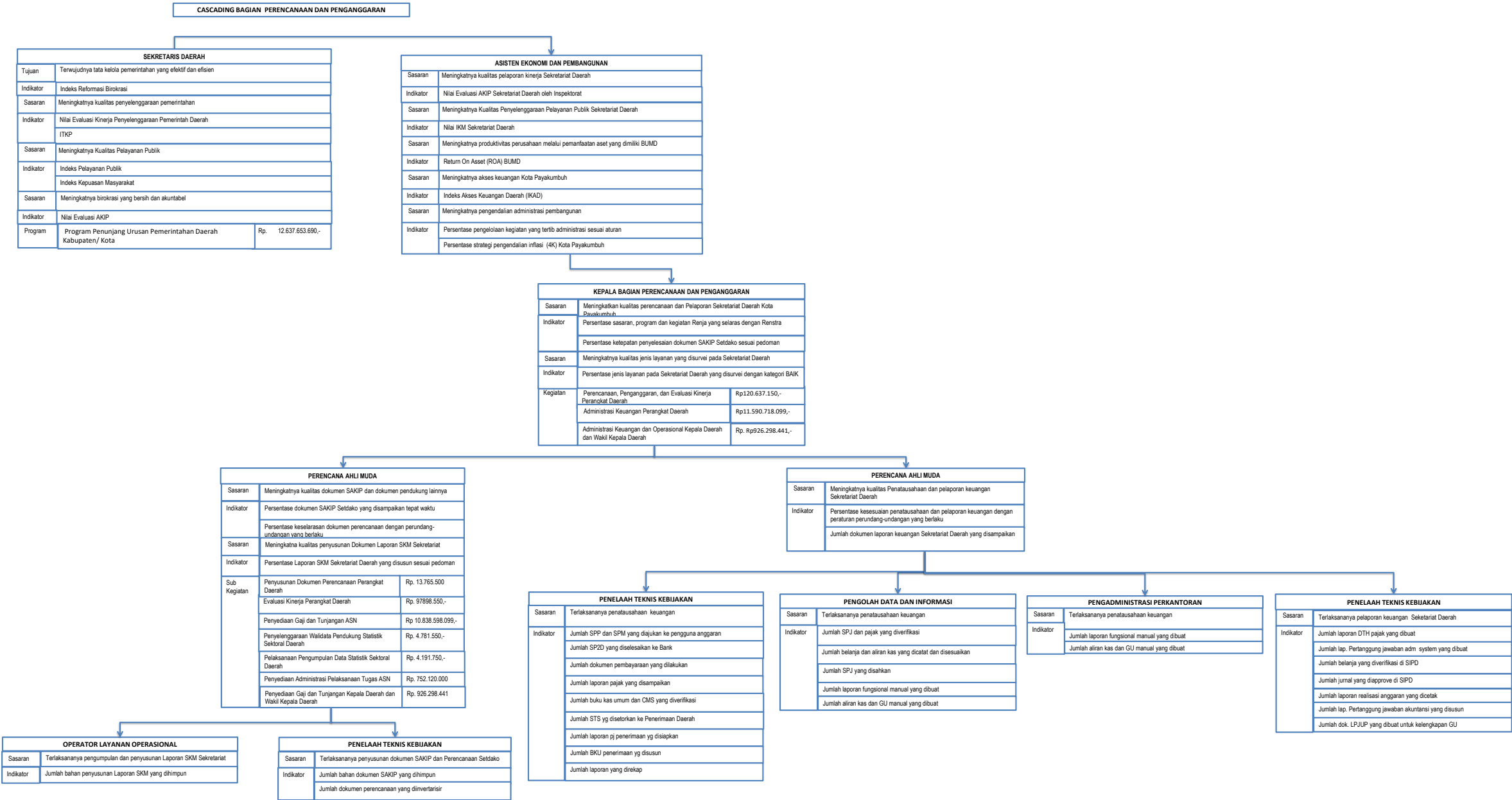
KEPALA BAGIAN HUKUM		
Sasaran	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
	Persentase kasus bantuan hukum yang tertangani	
	Persentase Perda yang dibahas di DPRD setelah diuluskan pemrakarsa	
	Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan ke masyarakat	
Kegiatan	Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 625.563.400,-

	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	
Sasaran	Meningkatnya kualitas Perundang-Undangan Daerah	
Indikator	Persentase rancangan produk hukum daerah yang disampaikan untuk harmonisasi dan fasilitasi	
	Jumlah ranperda yang disampaikanke DPRD untuk dibahas pada tahun n	
	Jumlah produk hukum yang ditetapkan : Perda, Perwako dan Keputusan	
Sub Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp 62.048.150,-

SUB KOORDINATOR BANTUAN HUKUM		
Sasaran	Meningkatnya koordinasi penyelesaian masalah hukum	
Indikator	persentase penyelesaian permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	
Sasaran	Meningkatnya publikasi peraturan perundang-undangan	
Indikator	Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	
Sub Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp 535.019.950,-
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	Rp 28.495.300,-

PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Sasaran	Terdokumentasikannya produk hukum daerah dengan baik
Indikator	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	
Sasaran	Tersedianya bahan laporan di bidang bantuan hukum
Indikator	Jumlah laporan permasalahan hukum yang disusun



CASCADING BAGIAN PEREKONOMIAN		
SEKRETARIS DAERAH		
Tujuan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi	
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	ITKP	
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	
Indikator	Indeks Pelayanan Publik	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	
Sasaran	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	
Indikator	Nilai Evaluasi AKIP	
Program	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 92.122.150,-

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja Sekretariat Daerah
Indikator	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah
Indikator	Nilai IKM Sekretariat Daerah
Sasaran	Meningkatnya produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki BUMD
Indikator	Return On Asset (ROA) BUMD
Sasaran	Meningkatnya akses keuangan Kota Payakumbuh
Indikator	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Sasaran	Meningkatnya pengendalian administrasi pembangunan
Indikator	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan
	Persentase strategi pengendalian inflasi (4K) Kota Payakumbuh

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN		
Sasaran	Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Perekonomian Daerah	
Indikator	Persentase terlaksananya strategi pengendalian inflasi (4K) yang ditindaklanjuti	
	Persentase terlaksananya kebijakan ekonomi & SD energi dan mineral	
Sasaran	Meningkatnya koordinasi pengukuran IKAD yang difasilitasi	
Indikator	Persentase koordinasi pengukuran IKAD yang difasilitasi	
Sasaran	Meningkatnya koordinasi pembentukan dan pembinaan BUMD dan BLUD	
Indikator	Persentase BUMD dan BLUD yang sehat dan menguntungkan	
Kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 69.388.750,-
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 22.733.400,-

PERENCANA AHLI MUDA		
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi bidang ekonomi	
Indikator	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	
	Jumlah koordinasi pengukuran IKAD yang difasilitasi	
Sub	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 41.073.450,-

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	
Sasaran	Terlaksananya fasilitasi koordinasi bidang ekonomi
Indikator	jumlah rapat koordinasi bidang ekonomi yang difasilitasi
Sasaran	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Kebijakan Stabilitas Harga Pasar
Indikator	Jumlah rekomendasi terkait kebijakan stabilitas harga pasar yang disiapkan
	Jumlah laporan monitoring harga pasar yang disampaikan
	Jumlah Laporan TPID yang dikirim ke Biro Perekonomian Provinsi Sumbar

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA		
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi bidang ekonomi pertambangan dan energy	
Indikator	Persentase kebijakan/ program bidang ekonomi pertambangan dan energi yang terfasilitasi dan terkoordinasi	
Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp. 22.733.400,-

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	
Sasaran	terhimpunnya dokumen hasil pemantauan, evaluasi dan laporan lingkup kebijakan energi dan air
Indikator	Jumlah dokumen hasil pemantauan, evaluasi dan laporan lingkup kebijakan energi dan air yang dihimpun

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA		
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi pembinaan BUMD dan BLUD	
Indikator	Persentase BUMD dan BLUD yang dibina	
Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 28.315.300,-

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	
Sasaran	Terfasilitasinya pembinaan BUMD dan BLUD
Indikator	Jumlah dokumen pembinaan BUMD yang disiapkan
	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring BUMD dan BLUD yang disiapkan

CASCADING BAGIAN PBJ DAN DALBANG

SEKRETARIS DAERAH		
Tujuan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi	
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	ITKP	
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	
Indikator	Indeks Pelayanan Publik	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	
Sasaran	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	
Indikator	Nilai Evaluasi AKIP	
Program	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 196.801.500,-

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja Sekretariat Daerah
Indikator	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sekretariat Daerah
Indikator	Nilai IKM Sekretariat Daerah
Sasaran	Meningkatnya produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki BUMD
Indikator	Return On Asset (ROA) BUMD
Sasaran	Meningkatnya akses keuangan Kota Payakumbuh
Indikator	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Sasaran	Meningkatnya pengendalian administrasi pembangunan
Indikator	Persentase pengelolaan kegiatan yang tertib administrasi sesuai aturan
	Persentase strategi pengendalian inflasi (4K) Kota Payakumbuh

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENDALIAN		
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Payakumbuh	
Indikator	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	
Sasaran	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Pemerintah Kota Payakumbuh	
Indikator	Persentase capaian realisasi fisik & keuangan kegiatan	
Kegiatan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp14.860.100,-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp181.941.400,-

PENGELOLA BARANG JASA AHLI MUDA		
Sasaran	Meningkatnya monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pembagunan	
Indikator	Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	
Sub Kegiatan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	
	Pembangunan	Rp14.860.100,-

PENGELOLA BARANG JASA AHLI MUDA		
Sasaran	Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang/Jasa berbasis elektronik	
Indikator	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	
	Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan	
Sub Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	
		Rp140.852.700,-

KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA		
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi pengadaan barang/ jasa yang terakomodir melalui UKPBJ	
Indikator	Persentase tender/seleksi yang terselesaikan melalui UKPBJ	
	Persentase pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui UKPBJ	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp17.832.200,-
Sub Kegiatan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
		Rp23.256.500,-

PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN		
Sasaran	Tersusunnya laporan kegiatan pembangunan Kota Payakumbuh	
Indikator	Jumlah dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksana pembangunan OPD	
Sasaran	Terlaksananya rapat monitoring, evaluasi dan pelaporan	
Indikator	Jumlah rapat monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan dengan PD	

PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN		
Sasaran	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	
Indikator	Jumlah permasalahan melalui Pusat Bantuan yang ditindaklanjuti.	
	Jumlah Server dan Perangkat Penunjang lainnya yang dipastikan berjalan dengan baik, aman, dan lancar	
	Jumlah Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terfasilitasi	
	Jumlah dokumen data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan Laporan Penggunaan PDN dan UMK-K	
	Jumlah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipastikan berjalan dengan baik, aman, dan lancar	

PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA MUDA		
Sasaran	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang /Jasa yang terkoordinir melalui UKPBJ	
Indikator	Jumlah dokumen pendampingan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	
	Jumlah dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;	
	Jumlah dokumen pendampingan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	
	Jumlah dokumen pendampingan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola	

CASCADING BAGIAN PROTOKOLER DAN DOKUMENTASI

SEKRETARIS DAERAH		
Tujuan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi	
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	ITKP	
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	
Indikator	Indeks Pelayanan Publik	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	
Sasaran	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	
Indikator	Nilai Evaluasi AKIP	
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.233.413.627,-

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
Sasaran	Meningkatnya kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintahan
Indikator	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan
Sasaran	Meningkatnya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, profesional dan akuntabel
Indikator	Indeks Kematangan Organisasi
Sasaran	Meningkatnya kualitas kebijakan
Indikator	Indeks Kualitas Kebijakan
Sasaran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
Indikator	Indeks BerAKHLAK (Opsional)
	Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Kategori Pelayanan Baik
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori BAIK

KEPALA BAGIAN PROTOKOLER DAN DOKUMENTASI		
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan KDH dan WKDH	
Indikator	Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH yang sesuai SOP	
	Persentase pelayanan informasi kegiatan KDH dan WKDH yang dipublikasikan	
Kegiatan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 610.000.000
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 2.380.415.127
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 242.998.500

KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOLER		
Sasaran	Meningkatnya fasilitasi pelayanan kedinasan KDH/ WKDH	
Indikator	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi	
	Persentase rapat koordinasi yang difasilitasi dengan baik	
Sub	Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 96.315.750

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA		
Sasaran	Meningkatnya Fasilitasi Penatausahaan Kegiatan KDH dan WKDH	
Indikator	Persentase kelengkapan administrasi kegiatan kedinasan KDH dan WKDH sesuai SOP	
	Persentase sambutan/ pidato/ paparan KDH dan WKDH yang disiapkan dengan baik	
	Persentase agenda/ kegiatan kedinasan KDH dan WKDH yang terlaksana	
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan	Rp . 10.000.000
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala	Rp. 600.000.000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 1.971.180.427

SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI		
Sasaran	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	
Indikator	Persentase Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang didokumentasikan dengan baik	
	Persentase kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dipublikasikan dengan baik	
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU	Rp. 242.998.500
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 312.918.950

PENGELOLA KEPROTOKOLAN	
Sasaran	Terselenggaranya fasilitasi pelayanan kedinasan KDH/WKDH secara optimal
Indikator	Jumlah fasilitasi acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	
Sasaran	Terlaksananya Fasilitasi Penatausahaan Kegiatan KDH dan WKDH
Indikator	Jumlah jadwal kegiatan Kepala/Wakil Kepala Daerah yang disusun
	Jumlah Koordinasi yang dilakukan dengan Pejabat/Perangkat Daerah
	Jumlah Pidato/sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang disiapkan
	Jumlah Agenda yang disusun

PENATA KEPROTOKOLAN	
Sasaran	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi KDH dan WKDH kepada Masyarakat
Indikator	Jumah peliputan dan pendokumentasian kegiatan KDH/WKDH
	Jumlah pengelolaan foto/ vidio kegiatan KDH/WKDH
	Jumlah penghimpunan dan penyusunan hasil liputan kegiatan atau informasi yang layak untuk dipublikasikan

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	
Sasaran	Terlaksananya Pengelolaan Media Informasi dan Dokumentasi KDH/WKDH
Indikator	Jumlah Surat Kabar langganan KDH/WKDH, FORKOPIMDA dan Pimpinan di Sekretariat Daerah yang disusun dan didistribusikan
	Jumlah surat/ dokumen/ kelengkapan SPJ keuangan yang dikelola

